



Posko Desa Terbentur Pendanaan

GUNUNGKIDUL—Kepala desa mempertanyakan soal pendanaan untuk menjalankan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) tingkat mikro.

David Kurniawan, Lugas Subarkah, & Jumali
redaksi@harianjogja.com

- Operasional dari posko harus dipikirkan karena tidak mungkin menggunakan dana desa.
- Pemda DIY resmi memperpanjang PTKM mulai 9 Februari hingga 23 Februari mendatang.

Lurah Pacarejo, Semanu, Gunungkidul, Suhadi, mengaku bingung terkait dengan anggaran untuk operasional posko tersebut. "Tidak masalah ada posko. Wong kita juga sudah punya sukarelawan yang dibentuk melalui surat keputusan lurah yang bekerja untuk pendataan penerima BLT Dana Desa," kata Suhadi saat dihubungi, Minggu (7/2).

Menurut dia, operasional dari posko harus dipikirkan karena tidak mungkin menggunakan dana desa. Pasalnya, selain untuk pelaksanaan kegiatan, alokasi juga sudah tersedot guna merealisasikan BLT Dana Desa yang diberikan selama satu tahun.



► Halaman 10

Posko Desa...

"Ini yang harus dipikirkan. Apalagi ini sudah tahun berjalan dan APBDes sudah diketok sejak akhir Desember lalu. Sebagai gambaran untuk BLT Dana Desa dalam setahun akan mengeluarkan Rp360 juta," katanya.

Suhadi berharap selain adanya regulasi untuk posko, juga ada alokasi anggaran guna pengoperasionalan kegiatan. "Mudah-mudahan ada solusi terkait dengan masalah anggaran untuk operasional," katanya.

PJ Lurah Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kulonprogo, Syamsudin menyatakan pemerintah kalurahan telah menyiapkan dana sebesar Rp50 juta yang dialokasikan untuk penanganan Covid-19 selama masa perpanjangan PTKM. Dana tersebut diambil dari APBDes yang jumlah total keseluruhannya mencapai Rp1,5 miliar. "Dana kami memang sangat terbatas karena ada alokasi untuk BLT dan lainnya. Namun untuk kebijakan itu sudah kami siapkan sebesar Rp50 juta yang kami alokasikan untuk upaya pencegahan dan penanganan. Seperti patroli, penyiapan APD dan penanganan pasien positif," kata Syamsudin.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul, Ani Widayani, menuturkan meski kondisi keuangan desa berbeda-beda, pengaktifan Satgas Covid-19 di tingkat desa untuk memutus penularan Covid-19 sangat memungkinkan.

la mencontohkan di Sumbermulyo, yang memiliki Satgas Covid-19 di tingkat desa dan dusun, lengkap dengan selter untuk isolasi kasus positif di setiap dusun dan di tingkat kalurahan. "Selter Desa Sumbermulyo difasilitasi oleh Pemerintah kalurahan Sumbermulyo, dan didukung seluruh elemen masyarakat," katanya, Sabtu (6/2).

Warga, kata dia, mendukung isolasi mandiri dengan memberikan donasi logistik kepada warga yang dirawat di selter. "Bahkan saat ini logistik bantuan dari warga dan lembaga nonpemerintah di Sumbermulyo, melebihi kebutuhan warga yang dirawat di selter," katanya.

Selain warga, lembaga nonpemerintah maupun swasta juga mau ikut membantu logistik di selter kalurahan. Adapun dana desa yang diterima tahun ini sekitar Rp1,4 miliar, sebagian juga dialokasikan untuk operasional selter.

Perpanjangan PTKM

Pemda DIY resmi memperpanjang PTKM mulai 9 Februari hingga 23 Februari mendatang. Perpanjangan kebijakan untuk ketiga kalinya itu berdasarkan hasil evaluasi lima gubernur di Jawa dan Bali termasuk DIY dengan Presiden Joko Widodo. Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menuturkan dalam rapat evaluasi tersebut disampaikan PTKM kedua sejak 26 Januari lalu belum berpengaruh signifikan dalam menurunkan angka kasus positif. "PTKM ini [kasus positif] turun tapi kecil. Bapak Presiden minta penurunan ini diperbesar," ujar Sri Sultan Sabtu.

Namun dengan pertimbangan kasus Covid-19 sudah sedikit turun dan keseimbangan ekonomi, pada PTKM ketiga ini ada sedikit perbedaan, yakni pada batas jam operasional tempat usaha. Jika sebelumnya jam operasional maksimal sampai pukul 20.00 WIB, di PTKM ketiga ini akan dilonggarkan hingga pukul 21.00 WIB.

"Tapi tetap protokol kesehatan itu dijaga. Saya percaya sing *dodolan njogo* protokol. Tapi problemnya sing tukul *njogo ora*! Saya berharap pembelinya biarpun sampai jam sembilan, tetap mau menjaga protokol kesehatan. Sama-sama menjaga," katanya.

Ia menjelaskan untuk PTKM ketiga ini, Presiden mengarahkan pada konsep pengawasan pengamatan mikro, yakni memperkuat pengawasan memotong penularan di level pedukuhan, kalurahan, RT dan RW. Diharapkan penularan yang sudah sampai ranah keluarga dan keluarga dapat dibatasi. "Kalau di DIY kita ke arah Jaga Warga, untuk mengawasi pelaksanaan untuk kalau tidak perlu ya tidak usah *nonggo*. Kalau tidak penting tidak usah pergi, kalau pergi protokol kesehatan dipakai. Dengan Jaga Warga menjaga untuk mengurangi mobilitas di level itu," ujarnya.

Untuk mendukung Jaga Warga ini, Pemda DIY telah mengeluarkan keputusan yang memungkinkan APBDes untuk digunakan pada penanganan Covid-19. Effiah untuk bikin isolasi, jadi biar di kampungnya sendiri, maupun kebutuhan yang lain," katanya.

Ia meminta lurah untuk tidak ragu mengambil anggaran dari APBDes karena Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri segera menerbitkan payung hukum untuk keperluan tersebut.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, Biwara Yuswantana, menuturkan dalam Jaga Warga juga akan dilakukan pemetaan zonasi di setiap dusun, yang akan menjadi dasar tindakan yang harus diambil di setiap dusun. "Kalau tidak ada kasus di dusun itu, zonanya hijau. Kalau ada kasus kurang dari 25 persen itu kuning, kalau 26 persen sampai 50 persen itu oranye. Nanti ada peta di dusun itu yang kemudian seperti apa peran yang harus diambil. Kalau zonanya merah berarti seluruh dusun harus karantina," ujarnya.

Bupati dan wali kota diminta untuk mendorong pembentukan Satgas Covid-19 untuk menjalankan Jaga Warga ini. Satgas ini bertugas di antaranya untuk pencegahan, penegakan protokol kesehatan, dan keperluan isolasi mandiri baik di rumah maupun selter yang disediakan desa.

Jateng di Rumah Saja

Sementara itu, program *Jateng di Rumah Saja*, akhir pekan kemarin berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan di DIY. Di Pantai Glagah di Kapanewon Temon, Kulonprogo misalnya destinasi yang setiap akhir pekan ramai dikunjungi wisatawan, terutama asal Jateng lengang sejak kebijakan itu diberlakukan.

Koordinator Salimnas Rescue Istimewa Wilayah V Kulonprogo, Aris Widiatmoko mengatakan kondisi Pantai Glagah, pada Minggu atau hari kedua pelaksanaan Jateng di Rumah Saja, terpantau sepi.

"Dari hasil pengamatan, siang ini [kemarin] terpantau sepi," kata Aris.

Aris menerangkan dari pendataan TPR Glagah, jumlah pengunjung hingga siang ini baru sekitar 1.300 an orang. Jumlah itu turun signifikan dibandingkan hari-hari sebelumnya yang bisa mencapai lebih dari 3.000 kunjungan.

Kondisi yang sama terjadi di Bantul. Jumlah kunjungan wisatawan ke pantai tersebut terlihat sepi.

"Hari ini [kemarin], yang berkunjung bisa dihitung dengan jari. Sepi," kata Komandan SAR Satlinmas Wilayah III Bantul, Ali Sutanta Joko Saputro, Minggu.

Dia menambahkan jika biasanya banyak mobil pribadi dan bus mendatangi kawasan pantai tersebut, maka kali ini terlihat sepi. "Di parkir pengunjung juga sepi. Tidak ada rombongan," ujarnya.

Ali menduga sepiunya pengunjung di tempat tersebut karena adanya kebijakan dari Pemprov Jateng yang menerapkan *Jateng di Rumah Saja*. "Sepertinya karena hal itu. Karena selama ini memang banyak warga Jateng yang berkunjung ke sini," ungkap Ali.

Dinas Pariwisata Gunungkidul mengklaim program *Jateng di Rumah Saja* tak mempengaruhi kunjungan wisatawan di Gunungkidul. Pasalnya, tingkat kunjungan hampir sama dengan penyelenggaraan selama libur akhir pekan pada masa PTKM.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunungkidul, Hary Sukmono mengatakan jika mengacu pada kunjungan pada Sabtu mencapai 3.618 pengunjung. Jumlah ini naik sedikit dibandingkan dengan data kunjungan pada Sabtu (30/1) yang mencapai 3.262 orang. "Tidak signifikan naiknya," kata Hary.

Menurut dia, kenaikan bukan disebabkan adanya program Jateng di rumah saja, tetapi lebih disebabkan karena faktor pembukaan Heba Ocean View di kawasan Pantai Gesing, kalurahan Girikarto, Panggang. "Di sana lagi viral sehingga kunjungan terfokus di lokasi tersebut," katanya.

Di Sleman jumlah wisatawan justru meningkat akhir pekan kemarin. Ketua Asosiasi Jeep Wisata Lereng Merapi (AJWLM), Daldiri, menjelaskan kunjungan wisatawan ke wilayah Kaliurang mulai meningkat pada akhir pekan ini. Meskipun jumlah kunjungannya tidak senormal sebelumnya. Ia mengatakan, pada akhir pekan ini puluhan jip mulai terlihat keluar membawa penumpang. Jumlahnya, kata Daldiri, ada sekitar 40 unit. "Ya banyak wisatawan yang dari wilayah Jawa Tengah. Mungkin jenuh disuruh di rumah, terus jalan-jalan. Ada juga yang penasaran dengan erupsi Merapi dan ingin menyaksikan lava pijar," katanya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY menilai kebijakan *Jateng di Rumah Saja* tidak begitu berpengaruh pada tingkat okupansi, lantaran saat ini juga masih sepi karena kebijakan PPKM Jawa-Bali. "Tidak begitu pengaruh pembatasan Sabtu Minggu itu, masih ada yang ke Jogja, tetapi kan memang masih sedikit kunjungan. Pengaruh dari yang pembatasan Jawa-Bali itu," ucap Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono.

Ia mengatakan saat ini okupansi hotel di DIY masih pada kisaran 5%-15%. Menurutnya kondisi hotel maupun resto sangat berat saat ini, karena dampak pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlangsung hampir satu tahun. (Andri

Hamid Razak, Jati Rehan Dewantara, & Herlambang Jati Kusumo)

PTKM DI DIY DIPERPANJANG

Pemda DIY memastikan memperpanjang Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) sampai 23 Februari mendatang. Pada pelaksanaan PTKM 1 dan 2 selama satu bulan, Satpol PP DIY menemukan ribuan pelanggaran.

Jenis Pelanggaran



1 PEMAKAIAN MASKER

Total kasus
1.298 pelanggaran

SANKSI

- Sanksi sosial yakni menyapu jalan **1.084**
- Penyitaan KTP **176**

KAPASITAS MAKSIMAL 25%



Total kasus
509 tempat makan

SANKSI

- Sanksi teguran lisan **1.117 pelanggaran**
- Surat Peringatan 527 pelanggaran
- Penutupan sementara **109 pelanggaran**

Perpanjangan PTKM



Jam operasional tempat usaha maksimal pukul 21.00 WIB.



Kapasitas tempat makan dari 25% menjadi 50%



Penerapan *work from home* (WFH), yang sebelumnya 75% WFH dan 25% *work from office* (WFO), menjadi 50% WFH dan 50% WFO.



2 KETENTUAN WORK FROM HOME

Total kasus
69 perusahaan

3 MELANGGAR JAM OPERASIONAL

Total kasus
1.037 tempat usaha



Sumber: Satpol PP Pemda DIY. Grafik: Harlan Jingga/Tri Hastono

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 16 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005